DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali,1985.

C.S.T Kansil dan Christine S. T, Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,2008.

Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh: Siah Kuala University Press, 2008.

Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah RI,2006.

_____*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press,2013.

_____ *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1996.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama,2009.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008.

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.

Moh. Mahfud M.D, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media,1999.

Novendri M Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi, Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis*. Jogjakarta: UII Press,2014.

Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia,1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang MPR dan DPR

Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014.

Internet

Irman Gusman, http://www.dpd.go.id/artikel-dpd-usul-peradilan-khusus-pejabat-negara diakses pada tanggal 12 November 2015.

J.C. T Simorangkir, http://www.miftakhulhuda.com diakses pada tanggal 6 Desember 2015

John Pieris, Urgensi Forum Previlegiatum http://e-tvberita.com/news/dpd-bentuk-forum-previlegiatum-untuk-pejabat-bermasalah/, diakses pada tanggal 31 Januari Pukul 09.00 WIB.

Mahfud MD, http://satriaranggaputra.blogspot.co.id/2015/07/impeachment-presiden-danatau-wakil.html diakses pada tanggal 7 Desember 2015.

MartinHutabarat,http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/11403231/Anggota.DPR.Hak.Imunitas.untuk.Jaga.Kehormatan.Dewan diakses pada tanggal 30 Januari 2016 Pukul 07.39.Arti kata Hak Imunitas, www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 28 Januari 08.30 WIB.

http://www.kbbi.web.id//artikatahakimunitas diakses pada tanggal 28 Januari Pukul 08.00 WIB.

http://www.wikipedia.org//artikataimunitas diakses pada tanggal 28 Januari Pukul 08.10 WIB.

http://Kbbi.web.id/ lembaganegara diakses pada tanggal 6 November 2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 12 Januari 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 07.35.